

STRATEGI ADAPATASI NELAYAN PENGEMBANGAN WISATA PANTAI 9 DI DESA BRINGSANG, KECAMATAN GILI GENTING KABUPATEN SUMENEP

Widiyanto Kusumah¹, Arie Wahyu Prananta²,
Aminah Dewi Rahmawati³, Syamsu Budiyan⁴

Prodi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura
WidiyantoKusumah@gmail.com

ABSTRACT

The construction of Pantai 9 Sumenep district Madura Island has had positive and negative impacts on the Madurese community. Ecotourism project development that has been planned by the government certainly requires a land acquisition program. This land acquisition program became the next stage with the establishment of Pantai 9 to turn Madura into an industrialized area. The pros and cons of the people of Pantai 9 in the land acquisition program have made the community fight against the government.

To find out the form of community resistance to the government in land acquisition for ecotourism projects in Bringsang Village, Gili Genting District, Sumenep Regency. purposive sampling technique, the type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from unstructured interviews. Secondary data obtained from literature study.

In this study to analyze the data using the theory of resistance Sidney Tarrow. The results showed that the form of resistance owned by the people of Pantai 9 was with actions based on the politics of resistance that facilitated the public to openly express opinions. Creating an organizational structure for community groups against evictions as a vehicle for mobilizing the resistance movement and the process of framing the Pantai 9 community groups together making banners by creating meanings by displaying slogans.

Keywords: Resistance Industrialization, Ecotourism, Framing, 9 Beach

ABSTRAK

Pembangunan Pantai 9 di Kabupaten Sumenep Pulau Madura melahirkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Madura. Pembangunan Proyek Ekowisata yang telah direncanakan oleh pemerintah tentunya membutuhkan sebuah program pembebasan lahan. Program pembebasan lahan inilah yang menjadi tahap berikutnya dengan berdirinya Pantai 9 untuk menjadikan Madura sebagai kawasan industrialisasi. Pro dan kontra masyarakat Pantai 9 dalam program pembebasan lahan menjadikan masyarakat melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Untuk mengetahui bentuk perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam pembebasan lahan proyek ekowisata di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan ingin menjabarkan dan menjelaskan gerakan perlawanan penolakan pembebasan lahan pada proyek Ekowisata, dengan jenis penelitian studi kasus dan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari wawancara tidak terstruktur. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data menggunakan teori perlawanan Sidney Tarrow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan yang di miliki oleh masyarakat

Pantai 9 yaitu dengan tindakan yang di dasari oleh politik perlawanan yang memfasilitasi masyarakat untuk keterbukaan menyampaikan pendapat. Membuat struktur organisasi kelompok masyarakat tolak penggusuran sebagai wahana mobilisasi gerakan perlawanan dan proses framing kelompok masyarakat Pantai 9 bersama-sama membuat banner dengan menciptakan makna-makna dengan menggelar slogan-slogan.

Kata Kunci: Industrialisasi Perlawanan, Ekowisata, Framing, Pantai 9

PENDAHULUAN

Madura merupakan salah satu pulau yang menyimpan sejuta potensi lokal salah satunya sektor pariwisata. Secara umum dilihat dari potensi alamnya Madura memiliki banyak bukit, air terjun, goa dan pantai. Sedangkan untuk wisata Religi lebih banyak terdapat di daerah Sumenep. Sumenep memiliki banyak potensi wisata religi karena kabupaten Sumenep terkenal dengan julukan kota santri atau bumi Sholawat. Namun, untuk daerah Sumenep kurang memiliki daya tarik pariwisata alamnya dan masih belum terlalu di kembangkan.

Pemerintah ingin menjadikan Pantai 9 sebagai tempat tujuan wisata baru. Dimana menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang ingin berlibur ke pulau Madura di area pesisir Pantai 9. Untuk itu dukungan infrastruktur yang sesuai dengan pengembangan Pulau Madura ke depan mengenai kebijakan pembangunan pariwisata sebagai salah bentuk infrastruktur yang memberi peluang pertumbuhan sosial maupun ekonomi khususnya di Pulau Madura. Dalam masalah ini pemerintah membentuk sebuah badan pelaksana yaitu Pantai 9. Kebijakan pembentukan BPWS sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 23 tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. BPWS yang baru dibentuk pada tahun 2010 oleh pemerintah pusat yang bersifat sementara mempunyai visi yakni tercapainya wilayah Pantai 9 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan sebagai simpul transportasi nasional yang tetap dapat mempertahankan nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam mewujudkan visi ini BPWS bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yang merupakan wilayah pengembangan Pantai 9. Dengan demikian hal ini tentu dapat menstimulasi peningkatan sosial ekonomi masyarakat Sumenep.

Beroperasinya Pantai 9 membawa dampak bagi struktur tata ruang pembangunan khususnya di Jawa Timur. Oleh karena itu, konsep pengembangan kota metropolitan Gerbangkertosusilo sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008) yang menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu pusat kegiatannya. Semakin mudahnya akses dan transportasi ke Pulau Madura dari pada transportasi dipelabuhan Kamal dimana akan meningkatkan investasi pengusaha besar dan investor asing, karena investasi di Madura relatif sama bahkan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan kota Surabaya.

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan pariwisata harus melakukan pembebasan tanah dan rumah warga di sekitar area Pantai 9 sisi Madura. Pantai 9 sisi Madura yang potensial untuk dikembangkan ialah daerah Pantai 9 dimana daerah ini

lokasinya dekat dengan Pantai 9. Karena Pantai 9 disisi Madura akan dijadikan sektor pariwisata atau yang nantinya akan menjadi Ekowisata seperti yang dikutip dari Kompas.com "*Pantai 9 merupakan tempat tujuan wisata baru. Apalagi, pemandangan Pantai 9 saat matahari terbenam akan menjadi daya tarik sendiri,*" ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Travel Indonesia (Asita) Jatim, Haryono Gondhosoewito, Selasa (30/3/2010).

BPWS garap objek wisata bibir pantai di rest area Pantai 9 secara bertahap, tahap pertama pembangunan 180 stand PKL, dimana rest area diproyeksikan sebagai kawasan relokasi PKL Pantai 9. Pantai 9 mulai melanjutkan pembangunan objek wisata bibir pantai di Kawasan Kaki Pantai 9 Sisi Madura (KKJSM), secara bertahap pula akan mengisi KKJSM dengan kawasan industri, perdagangan, pariwisata, Central Business District (CBD) dan permukiman. Selain wahana wisata pantai, di dalamnya akan dibangun *food court*, ruang terbuka hijau (RTH), museum, masjid, dan *Islamic Centre*, hingga SPBU (surabaya.tribunnews.com).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 27/2008 tentang Pantai 9 Wahana wisata pantai yang dilengkapi dengan taman rekreasi itu berada dikawasan 4 hektare. Disisi timur dan barat Pantai 9 yang menjadi bagian dari 40 hektare kawasan rest area dan akan mengembangkan lahan 600 hektare untuk pembangunan KKJSM, 600 hektare untuk pembangunan KKJSS dan kawasan khusus pelabuhan peti kemas di sekitar Tanjung Bulu Pandan, Sumenep, seluas 600 hektar (surabaya.tribunnews.com) "*Kami juga akan melibatkan tim appraisal tanah sebelum melakukan pembelian kepada masyarakat*" ungkap Kepala Devisi dan Informasi BPWS, Pandit Indrawan, Selasa (29/5/2018) yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat setelah terjalin kerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep.

Dalam persoalan ini, kondisi Madura khususnya di Dusun Pantai 9 tentang pembebasan tanah dan rumah warga untuk pembangunan wisata di sekitar area Pantai 9 pro dan kontra warga Pantai 9 mengenai pembebasan tanah, dimana masyarakat Sekar Bungoh yang tidak setuju pembebasan lahan 138 KK dan yang setuju pembebasan lahan hanya 7 KK. Sedangkan Pantai 9 bagian barat (Krasak) sudah melakukan pembebasan lahan pada gelombang 1 pada tahun 2017 dilanjut gelombang ke dua pada tahun 2018, lahan tersebut mulai digunakan untuk pembangunan rest area Pantai 9 dengan pembangunan 180 stand PKL. Alasan masyarakat kontra pada pembebasan lahan karena warga setempat mengalami kesulitan mencari lahan pengganti, masyarakat tidak mau meninggalkan kampung halaman karena tanah merupakan warisan nenek moyang, harga tanah dari masyarakat sangat mahal sehingga masih di tawar oleh pihak BPWS dan kesulitan dalam hal mencari pekerjaan baru karena mayoritas masyarakat Pantai 9 mata pencahariannya yaitu petani (nelayan). Proses pembebasan tanah baik untuk pariwisata maupun kawasan industri, harapan masyarakat dilakukan secara terbuka/terang-terangan dan langsung kepada rakyat tanpa adanya makelar tanah serta tidak merugikan rakyat.

Masyarakat melakukan perlawanan awalnya secara sembunyi-sembunyi berlangsung lama pada tahun 2009 sejak diresmikannya Tol Pantai 9 terdapat isu pembebasan lahan

program pemerintah selanjutnya. Masyarakat awalnya membentuk paguyuban tolak penggusuran dengan visi misi yang sama, tujuannya untuk melakukan penolakan pembebasan lahan yang menjadi Proyek Pemerintah yaitu Ekowisata. Masyarakat mengusulkan Desa Wisata kepada pihak BPWS supaya dengan adanya Desa Wisata tidak harus menggusur penduduk sekitar area Pantai 9 sisi Madura. Usulan masyarakat tidak diterima oleh Pemerintah yang pada akhirnya masyarakat mulai melakukan perlawanan secara terbuka pada tahun 2017 dengan mengumpulkan warga untuk bermusyawarah masalah pembebasan lahan dan membentuk struktur baru yaitu kelompok masyarakat tolak penggusuran secara legal/resmi.

Gerakan perlawanan yang terjadi muncul pada pemerintah dan masyarakat telah mewarnai proses persiapan pembangunan pariwisata Ekowisata ini. Pada tahap pelaksanaan, konflik tersebut semakin intensif karena berhadapan dengan pembebasan tanah, sehingga muncul relasi-relasi kepentingan. Akibatnya, nilai-nilai atau makna tanah bagi masyarakat Madura tergores oleh relasi kepentingan yang bersifat konvensional. Sehingga muncul konflik antara pemilik tanah dan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode jenis kualitatif karena ingin mengungkap masalah yang perlu pendalaman untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian., metode kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada proses dan makna. Bukan kepada pengukuran dan hubungan sebab akibat antara berbagai variabel (Sugiyono,2014 : 128)

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari individu secara intensif, integratif dan komprehensif. Penelitian pendekatan studi kasus dimana penelitian ini hanya ada di Dusun Pantai 9 tentang pembebasan pada proyek Ekowisata.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara semiterstruktur karena sebelumnya peneliti perlu melakukan suatu pengamatan serta kemudian menyusun pertanyaan pokok yang akan diajukan kepada informan agar sesuai dengan permasalahan.

Teknik *purposive sampling* digunakan oleh penelitian ini untuk menentukan informasi dan menggali informasi sebagai sumber data penelitian. Adapun yang menjadi informan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini ditentukan oleh beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Tokoh Masyarakat
2. Kepala Desa, BPWS
3. Pemilik Lahan (Setuju Pindah dan Tidak Setuju Pindah)

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (Silalahi, 2012 : 339-341) yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori gerakan perlawanan dari Sydney Tarrow yang menurut peneliti dianggap relevan dengan realitas dan data yang ditemukan dalam penelitian di lapangan karena dalam penelitian ini ada sebuah perlawanan dari masyarakat Dusun Sekar Bungoh yang membentuk sekelompok masyarakat tolak penggusuran yang merasa sebuah kebijakan atau rencana yang dikemukakan oleh pemegang kekuasaan/wewenang yang dalam hal ini adalah pemerintah (BPWS) dianggap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, harapan ke depan untuk masyarakat dan yang diinginkan masyarakat. Masyarakat yang tergabung dalam sebuah gerakan perlawanan ini pada dasarnya yaitu masyarakat yang menolak pembebasan lahan dan sedikit banyak paham mengetahui tentang permasalahan yang ada sebelumnya.

Sydney Tarrow (1998) berpendapat, gerakan perlawanan dianggap sebagai sumber harapan masyarakat (*source of Shope*) dalam menghadapi perkembangan kehidupan yang makin kompleks, hal ini merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada rasa solidaritas yang tinggi, mempunyai tujuan-tujuan bersama serta interaksi sosial yang berkelanjutan antara kaum elit, penentang dan pemegang kekuasaan (Offe dan mulecci dikutip dalam Sujatmiko, 2002).

A. Projek Ekowisata

Pembangunan Pantai 9 sebenarnya dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah yang ingin memajukan masyarakat Madura. Pembangunan Pantai 9 pada awalnya ialah satu paket dengan industrialisasi (Projek Ekowisata) Mutmainnah (1998 : 75).

Pembangunan Jemabatan Pantai 9 dilatar belakangi oleh upaya pemerintah yang ingin memajukan masyarakat Madura, salah satunya yaitu Madura Park. Sedangkan Pantai 9 ini merupakan langkah awal penerapan dibukanya gerbang utama Pulau Madura untuk menjalankan proses industrialisasi. Pulau Madura merupakan tempat yang di nilai cukup mumpuni untuk perluasan kawasan industri dari Kota Surabaya yang telah penuh sesak, karena Kabupaten Sumenep juga termasuk bagian dari Gerbang Kertasusila. Dimana sektor industri ini di nilai dapat membantu pertumbuhan ekonomi Pulau Madura khususnya Kabupaten Sumenep karena melihat kondisi alam Pulau Madura yang gersang dan tidak subur. Jumlah penduduk Madura yang dapat disertai lahan pertanian yang kurang subur semakin menutup kemungkinan untuk kemajuan Pulau Madura dapat tumbuh secara mandiri tanpa dibantu oleh industri. Kondisi tanah yang kering dan pemilikan-pemilikan lahan yang semakin sempit tidak akan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi rumah tangga petani masyarakat Gili Genting, sedangkan projek Ekowisata, khususnya yang mempunyai kapasitas penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar merupakan satu- satunya

pilihan untuk membangun kehidupan masyarakat Gili Genting yang lebih baik, sehingga apabila diabaikannya pilihan ini hanya akan melestarikan wajah muram masyarakat Madura khususnya masyarakat Gili Genting sebagai salah satu daerah miskin dan terbelakang di Indonesia.

B. Progam Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan yang akan dilakukan rupanya tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Padahal sebenarnya setelah dilakukan pendekatan, masyarakat Desa Sukolilo Barat khususnya Dusun Sekar Bungoh tidak merasa keberatan jika harus merelakan tanahnya untuk dijadikan lahan pembangunan pariwisata asalkan ganti rugi tanah sesuai dengan harga seharusnya. Namun rupanya uang ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak pengelola pariwisata sangat jauh dari harapan menurut masyarakat Sekar Bungoh, harga tanah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Memang pendapat masyarakat yang berbeda ini menimbulkan beberapa anggapan miring mengenai proses pembebasan lahan tersebut, namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwa harga yang ditawarkan pemerintah sudah sesuai dengan harga tanah Kecamatan Gili Genting. Jadi anggapan miring tidak ditujukan kepada pihak pemerintah saja, namun juga kepada warga yang terlalu berambisi meraup keuntungan dari pembebasan lahan itu. Akan tetapi meskipun warga melakukan protes pada akhirnya mereka akan terdesak dan tak ada pilihan lain, seperti yang telah dilakukan ketika pembebasan lahan untuk pembangunan Pantai 9.

Tahap awal selesai BPWS melanjutkan program berikutnya pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan pariwisata bibir pantai sebagai modal awal wisata pantai dengan membutuhkan 4 hektare lahan disisi kanan dan kiri Pantai 9 bagian Madura. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 27/2008 tentang Pantai 9 Wahana wisata pantai yang dilengkapi dengan taman rekreasi itu berada dikawasan 4 hektare. Pro dan kontra masyarakat Pantai 9 mendengar isu pembebasan lahan. Masyarakat Pantai 9 sangat mengantisipasi industrialisasi yang akan terealisasi beberapa tahun ke depan. Mereka ingin menjadi tuan rumah Ekowisata bukan hanya sebagai penonton belaka dengan menikmati pembangunan Pantai 9 tanpa adanya pengusiran/penggusuran. Jerih payah masyarakat ketika di kampung halaman ini tidak bisa dijual begitu saja, masyarakat juga ingin merasakan hasil yang ditanam selama berada di Dusun Sekar Bungoh. Masyarakat berharap janji pemerintah Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo yang telah menjanjikan Desa Wisata di Dusun Pantai 9 tanpa penggusuran seperti halnya di Bali. Keluhan masyarakat kepada Bapak Jokowi dalam surat yang dikirimkan

Surat penolakan yang dikirim ke Presiden tidak mendapatkan respon hingga masyarakat melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar dan mencari bantuan ke lembaga-lembaga yang dapat membela masyarakat dari pembebasan lahan tersebut. Masyarakat menginginkan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak atas kepemilikan tanah, hak untuk berpendapat

dan hak terhadap keadilan pemerintah untuk masyarakat.

Adapun pelaku yang ikut serta berperan dalam panitia pembebasan lahan adalah pemerintah yang diwakili oleh BPWS, BPN, PEMDA, Forkopincam dan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu jalannya Projeck Ekowisata yang telah direncanakan oleh BPWS yang dibantu oleh Kyai sebagai tokoh masyarakat di kampung tersebut dengan strategi mensiasati masyarakat agar dapat membebaskan tanah milik masyarakat

Dalam mewujudkan tindakan berkelanjutan secara bertahap, Charles Tilly mengungkapkan lebih jauh tentang persiapan yang harus dimiliki sebagai perangkat lunak dalam berpartisipasi di ruang publik politik, yaitu organisasi, mobilisasi, dan kesempatan menurut Izudin (2015 : 14) mengutip dari Charles Tilly (1978 : 77) Dari ketiga perangkat lunak tersebut didedikasikan sebagai tindakan yang harus dimiliki oleh masyarakat.

1. Kesempatan Politik

Kesempatan Politik atau *Political Opportunity Approach*, Proses politik yang dilakukan masyarakat Pantai 9 lebih memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan masyarakat biasa membentuk suatu gerakan perlawanan yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan (pemerintah). Dimana masyarakat memperjuangkan untuk melawan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Analisis Gerakan perlawanan sebagai politik perlawanan pada teori Tarrow, masyarakat Pantai 9 yang bergabung dalam kelompok masyarakat tolak pengusuran yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak mengerti akan keadaan masyarakat yang menginginkan sebuah keadilan terhadap hak atas tanah. Tidak adanya keterbukaan masalah harga tanah. Masyarakat Pantai 9 meminta dukungan terhadap perlawanan ini kepada lembaga- lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berkembangnya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pantai 9 ditentukan oleh adanya kesempatan politik yang dimiliki masyarakat sebagaimana dijelaskan Pragoyo (2008: 165) sebagai sebab perlawanan yaitu perubahan politik. Runtuhnya rezim Orde Baru membuat iklim politik menjadi terbuka sehingga memungkinkan gerakan perlawanan berkembang dengan memberi kebebasan berkumpul, keterbukaan menyampaikan pendapat dan adanya pers yang bebas.

Perlawanan masyarakat Pantai 9 sebagai suatu gerakan perlawanan yang dilakukan secara kolektif serta melibatkan seluruh elemen yang ada, perlawanan ini juga terorganisir ke dalam beberapa organisasi dan lembaga yang terlibat di dalamnya yaitu Kelompok Masyarakat tolak pengusuran, Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna Gema Samudra dan Rukun Kematian. Selain itu masyarakat Pantai 9 meminta bantuan kepada PB NU (Nahdlatul Ulama), LBH Surabaya. Seluruh lembaga ini yang menjadi wahana masyarakat Pantai 9 untuk melakukan perlawanan ke pemerintah. Dimana dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat, dapat menentukan arah bagi masyarakat Pantai 9 dari awal persiapan pembentukan struktur kelompok masyarakat tolak pengusuran. Pernyataan dari Ketua Kelompok Masyarakat Tolak Pengusuran:

2. Struktur Mobilisasi Masyarakat

Dusun Sekar Bungoh Struktur atau lembaga sosial yang dimanfaatkan sebagai wahana mobilisasi (*mobilizing structure*) sebagai cara-cara yang disepakati untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang meliputi repertoar taktik-taktik tertentu, bentuk organisasi gerakan perlawanan khusus dan repertoar modular (rancangan) menurut Mc Carthy (2004: 141-142, dalam Sukmana, 2016:195-196). Gerakan masyarakat Dusun Pantai 9 yang dibangun dapat memperkuat gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat Sekar Bungoh dengan tujuan visi misi yang sama yaitu mempertahankan kampung halamannya. Gerakan perlawanan masyarakat Pantai 9 memiliki struktur yang tidak kaku dan bersifat mengalir. Hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya rotasi kepemimpinan, semua isu pembebasan lahan dilakukan voting dan memiliki organisasi yang tidak permanen.

Masyarakat ketika melakukan penolakan kepada Pemerintah membentuk Struktur Kepengurusan Paguyuban Tolak Penggusuran pada tahun 2017 secara tertulis dan tidak resmi, dengan harapan bisa mempermudah jalannya perlawanan yang dilakukan masyarakat.

Pada tahun 2017 membentuk sebuah paguyuban tolak penggusuran yang tidak resmi/ilegal, hanya sebatas formalistas. Masyarakat sulit untuk meminta bantuan kepada lembaga masalah pembebasan lahan karena paguyuban tidak diakui oleh pemerintah. Ketua paguyuban tolak penggusuran tidak bisa menetap di kampung halamannya karena beliau kerja di luar negeri, hingga menjadi hambatan untuk melakukan perlawanan berkelanjutan. Disisi lain faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong jalannya organisasi atau pun faktor yang menghambat gerakan perlawanan masyarakat Pantai 9 ini. Sehingga beriring berjalannya waktu pemerintah mulai melakukan pembebasan lahan pada gelombang pertama di Dusun Kampung Sawah dan Dusun Sekar Bungoh bagian barat (Krasak) pada gelombang kedua. Masyarakat mulai resah akan hal itu hingga mereka mengadakan musyawarah besar-besaran dan mereka mempunyai inisiatif untuk mengubah struktur organisasi yang ada.

Perubahan struktur kelompok masyarakat tolak penggusuran 2018. Ketika pemerintah mengadakan sosialisasi tanpa mengundang warga yang kontra terhadap pembebasan lahan. Kelompok masyarakat ini dibentuk setelah sosialisasi tersebut, masyarakat berkumpul dan membentuk struktur kepengurusan yang legal. Kelompok masyarakat dalam gerakan perlawanan menjaga keamanan warga di Dusun Sekar Bungoh. Kelompok ini sedang berusaha mengadakan audiensi yang dihadiri Lembaga Bantuan Hukum tentang Hukum Pengadaan Tanah, Hak Asasi Manusia dll. Selain itu mencari media yang bisa membantu masyarakat dalam segi publikasi dan masyarakat berusaha bertemu dengan Bu Khofifah selalu Gubernur Jawa Timur.

Masyarakat membuat struktur baru terhadap gerakan perlawanan yang secara legal, dimana struktur-struktur ini berperan sebagai wahana mobilisasi gerakan sosial masyarakat Pantai 9 dan masyarakat memperluas jaringan untuk lebih memperkuat gerakan perlawanan ini, karena keberhasilan atau pun kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa

banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi dengan sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh masyarakat Sekar Bungoh.

Terpilihlah Bapak Ibnu Abdillah sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Tolak Penggusuran Dusun Sekar Bungoh. Masyarakat mulai meminta perlindungan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, selain itu meminta perlindungan ke forum rektor Universitas Trunojoyo Madura. Masyarakat juga meminta bantuan kepada Profesor Dr. Ari Wibowo SH. M. HUM, beliau adalah pakar hukum sekaligus pemerhati masalah sosial, beliau dosen di Universitas Airlangga, dan masyarakat menyiapkan pengacara masalah pembebasan lahan kepada Bapak Dr. Wahid Habibullah selaku Ketua LBH Surabaya.

3. Pembingkai Kultural

Mengacu kepada pandangan Benford dan Snow (2000: 614) dikutip Sukmana (2016: 203) menyatakan bahwa *framing* membantu untuk membuat suatu peristiwa atau kejadian memiliki makna (arti) dan dengan demikian berfungsi untuk mengatur pengalaman dan membimbing tindakan. *framing* tindakan kolektif merupakan seperangkat aksi yang berorientasi memberikan keyakinan dan makna yang menginspirasi dan melegitimasi kegiatan dan kampanye dari lembaga gerakan perlawanan, dimana masyarakat membuat Spanduk penolakan pembebasan lahan disebar luaskan di sekitar pinggir jalan Dusun Sekar Bungoh, selain itu masyarakat memposting spanduk tersebut di media sosialnya masing-masing.

Dalam proses *framing* kelompok masyarakat Pantai 9 secara bersama-sama membuat *banner* penolakan di Dusun Pantai 9 yang memiliki makna-makna yang masyarakat bangun berdasarkan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan yang mereka alami. Adapun wujud *framing* yang digunakan adalah mengusung dan menggelar slogan-slogan antara lain : "*BPWS harus membuat kampung wisata tanpa penggusuran warga*". Seluruh slogan yang diciptakan pada dasarnya bertujuan untuk mengugah kesadaran masyarakat dan memengaruhi kebijakan publik di Dusun Sekar Bungoh.

Framing (pembingkai) dalam gerakan perlawanan ini sebagai strategi yang digunakan masyarakat Pantai 9 untuk dapat menyamakan pandangan baik dari perilaku maupun dari masyarakat terhadap suatu isu pembebasan lahan.

Dalam gerakan perlawanan, proses *framing* digunakan untuk mendiagnosis suatu kondisi yang bermasalah untuk dipecahkan, menawarkan jalan keluar dan menawarkan alasan pembelaan ataupun membenaran untuk memotivasi masyarakat terhadap dukungan dari aksi perlawanan.

Faktor peluang atau kesempatan politik dan struktur mobilisasi merupakan fondasi yang potensial untuk terjadinya suatu tindakan, jika salah satu faktor tersebut tidak ada maka kecil kemungkinan suatu tindakan kolektif akan berjalan, karena penghubung antara faktor kesempatan politik, organisasi kelompok masyarakat tolak penggusuran dan tindakan yang dapat menjalankan gerakan perlawanan masyarakat Sekar Bungoh. Dan juga *Framing* tindakan kolektif akan memobilisasi masyarakat untuk menggalang dukungan melawan pemerintah. Keberhasilan gerakan perlawanan masyarakat Pantai 9 dalam

melawan/menolak (menggagalkan) penggusuran (pembongkaran) rumah warga di Pantai 9 bagian barat (Krasak). Gerakan ini berhasil menunda pembebasan lahan hingga lima tahun lamanya, meskipun pada akhirnya pembebasan lahan tetap dilaksanakan pada waktu berikutnya.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini yang berjudul Pemerintah VS Rakyat (Studi Kasus Perlawanan Warga Dalam Menolak Pembebasan Lahan Pada Projek Ekowisata di Dusun Pantai 9 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep) telah menghasilkan suatu temuan menarik yang telah diuraikan secara panjang pada bab pembahasan. Maka dari itulah hasil temuan tersebut akan ditarik kesimpulan ringkas pada bab terakhir ini.

1. Tanah bagi Orang Madura merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupannya (Subahianto, 2004; 113). Tanah/land memiliki makna yang tinggi, selain kaitannya yang erat dengan leluhur, makam, dan kekerabatan, tanah juga menjadi simbol status bagi Masyarakat Madura pada umumnya dan Masyarakat desa Sukolilo Barat pada khususnya.
2. Sejak dibangunnya Pantai 9 dan dilaksanakannya program pembebasan lahan untuk projek Madura Park di kawasan pintu masuk Pantai 9, nilai dan harga tanah di Desa Sukolilo Barat melambung tinggi.
3. Peluang-peluang politik (*policical opportunities*) yang memfasilitasi atau bekerja sebagai kendala bagi aktualisasi dan dinamika gerakan perlawanan masyarakat Pantai 9 adalah terbukanya era reformasi yang memberi kebebasan berkumpul, keterbukaan menyampaikan pendapat.
4. Struktur-struktur atau lembaga sosial tertentu dimanfaatkan sebagai wahana mobilisasi gerakan perlawanan masyarakat Sekar Bungoh, termasuk di dalamnya bagaimana *networking* yang dibangun dapat memperkuat gerakan sosial tersebut, menunjukkan bahwa struktur atau lembaga yang menjadi wahana masyarakat Pantai 9 dalam melakukan gerakan sosial meliputi Kelompok Masyarakat Tolak Penggusuran, Rukun Kematian, Karang Taruna Gema Samudra dll
5. Dalam proses *framing* kelompok masyarakat Pantai 9 secara bersama-sama membuat banner dan menciptakan makna-makna dengan mengusung dan menggelar slogan-slogan antara lain : *"BPWS harus membuat kampung wisata tanpa penggusuran warga"* . Seluruh slogan yang diciptakan pada dasarnya bertujuan untuk mengugah kesadaran masyarakat dan memengaruhi kebijakan publik.

REFERENSI

- Arifin, Faisal Yasin. 2016. *Edisi 18 ;Pantai 9 Membangun Dengan Hati*. BPWS
Arie Wahyu Prananta, Aminah Dewi Rahwawati, Syamsu Budiyaniti, Jumi'atul Holisah,
Widiyanto Kusumah, (2022) *Tourism Industrialization Model and the Effects on the*

Income, Employment Opportunity, and Economy in Sumenep City, Beach 9, Gili Genting District

Badan Pusat Statis. 2013. *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep 2013*. Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Badan Pusat Statis. 2014. *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep 2014*. Sumenep : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Izudin, Ahmad. 2015. *Gerakan Sosial Serikat Petani*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Koentjaraningrat, 2009. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mustain. 2007. *Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Mutmainnah, *Pantai 9: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*. Yogyakarta: LKPSM. 1998

Noeng Muhajir, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ranke Sarasin

Novri Susan, M.A, 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

RPJM, Sukolilo Barat. 2012. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012*

Ritzer, George. 2012. *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana

Scott, James. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama

Soekanto, Soerjono, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Rajawali Press

Subaharianto, Andang, dkk. 004. *Tantangan Industrialisasi Madura*. Malang: Bayumedia Publishing

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : CV. Alfabeta

Sugioyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabea

Sujatmiko, Budiman 2002. *Pembangunan Yang Menyingkirkan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang : Intrans Publishing

Syarbaini, Syahrial. 2013. *Dasar-dasar sosiologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu